

Swab Antigen Petugas Pengamanan Lebaran

GROBOGAN (KR) - Sebanyak 292 anggota Polres Grobogan menjalani swab antigen, setelah menjalankan tugas pengamanan Idul Fitri 1442 H, selama 14 hari. Menurut Kapolres Grobogan AKBP Jury Leonard Siahaan, kegiatan swab antigen dilakukan secara bertahap untuk menghindari kerumunan. "Kami ingin memastikan kondisi kesehatan usai melaksanakan tugas Operasi Ketupat Candi 2021. Ketika berangkat kondisi mereka sehat, dan setelah pulang mereka kita pastikan juga sehat tidak terpapar virus korona. Untuk itu, semuanya kita minta menjalani swab antigen," kata Jury Leonard, Rabu (19/5). Swab antigen dilakukan sebagai upaya antisipasi penyebaran Covid-19 di kalangan anggota Polres Grobogan, terutama pada anggota yang bertugas dalam Operasi Ketupat Candi 2021. (Tas)



Salah satu anggota Polres Grobogan menjalani tes swab antigen. KR-M Taslim

Bapemperda DPRD Grobogan Setujui Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah



GEMA DPRD KAB. GROBOGAN

GROBOGAN (KR) - Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Grobogan menyetujui usulan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah yang diajukan Bupati Grobogan. Raperda itu di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021 yang sudah ditetapkan sebelumnya. Rapat dipimpin Ketua Bapemperda Hj Lusida Indah Artani SE dihadiri Sekda Grobogan yang diwakili Asisten III (Administrasi Umum) Sekda Ir Muchamad Chanif MT, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Wahyu Susetjono SH MM, Kasubag Bagian Hukum Setda, dan Sekretaris Inspektorat. Asisten III mengatakan, pengusulan raperda dida-

sarkan pada ketentuan Pasal 3 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur bahwa pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud mulai berlaku, maka Perda yang sudah ditetapkan sebelumnya tetap berlaku. Asisten III Sekda menguraikan isi Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang diajukan tersebut terdiri dari lima belas bab dengan materi muatan, yaitu Bab I berisikan pengaturan mengenai Ketentuan Umum, Bab II berisikan pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab III berisikan pengaturan

mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bab IV berisikan pengaturan mengenai Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bab V berisikan pengaturan mengenai Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kemudian Bab VI berisikan pengaturan mengenai Pelaksanaan dan Penatausahaan, Bab VII berisikan pengaturan mengenai laporan realisasi semester pertama APBD dan Perubahan APBD, Bab VIII berisikan pengaturan mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, Bab IX berisikan pengaturan mengenai penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Kemudian Bab X berisikan pengaturan mengenai kekayaan daerah dan utang daerah, Bab XI berisikan pengaturan mengenai badan layanan umum daerah, Bab XII berisikan pengaturan mengenai penyelesaian kerugian keuangan daerah, Bab XIII berisikan pengaturan mengenai informasi keuangan daerah. Bab XIV berisikan pengaturan mengenai pembinaan dan pe-

ngawasan, dan Bab XV berisikan pengaturan mengenai ketentuan penutup.

Menanggapi isi usulan Raperda tersebut, anggota Bapemperda H Sukanto SH MH menilai, sebelum dibahas, draf isi Raperda yang diajukan Eksekutif perlu dibenahi lebih dulu karena sebagian isinya amburadul. Jika langsung dibahas akan menyusahkan Bapemperda. (Tas)



Bapemperda DPRD Grobogan saat membahas Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah dengan eksekutif. KR-M Taslim

Tempeleng Istri, Anggota KIP Jateng Dipecat

SEMARANG (KR) - Anggota Komisi Informasi Pubrik (KIP) Jateng, SH diberhentikan tetap sebagai anggota KIP Jateng, pada Senin (17/5). SH terbukti dengan sah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya, H.

Pemberhentian atau pemecatan diputuskan dalam Sidang Majelis Etik KIP Jateng diketuai Drs H Eman Sulaiman MH dan anggota Prof Dr Hj Sri Suhandjati Sukri serta Gede Narayana SE MSi, bertempat di Kantor KIP Jateng, Jalan Trilombajung Semarang.

Eman Sulaiman mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pihak pelapor (istri SH) yakni H, dan sejumlah saksi, termasuk saksi ahli, terlapor (SH), terbukti secara sah telah melakukan KDRT terhadap istrinya, dengan melakukan beberapa kali pemukulan.

"Di persidangan Majelis Etik menguatkan tindakan KDRT dilakukan terlapor SH. Ada keterangan saksi, foto, dan hasil visum," ungkap Eman. Perbuatan SH, melanggar Pasal 3 ayat 3 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi.

Serta Pasal 6 ayat a dan c Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi. "Majelis Etik KIP Jateng sepakat bulat menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tetap kepada terlapor SH dari jabatannya seba-

gai anggota KIP Jateng. Rekomendasi Majelis Etik KIP Jateng ini bersifat final dan mengikat," terang Erman.

Selain itu, Majelis Etik KIP juga merekomendasikan kepada Ketua KIP Jateng segera mengusulkan kepada Gubernur Jateng untuk memberhentikan secara tetap kepada SH. Kemudian hasil rekomendasi Majelis Etik tersebut diserahkan Ketua KIP Jateng Drs Sosiawan untuk ditindaklanjuti.

"Kami sampaikan terima kasih kepada Majelis Etik yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional. Proses sidang berjalan independen dan proposional," kata Drs Sosiawan didampingi Wakil Ketua Zainal Petir dan anggota Ermy Sri Ardhiyanti. Rekomendasi dari Majelis Etik, lanjut Sosiawan langsung ditindaklanjuti dengan melakukan rapat pleno untuk ditetapkan sebagai putusan res-

mi KIP Jateng dan segera diajukan ke Gubernur Jateng untuk pengusulan pemberhentian tetap SH.

Seperti diketahui kasus ini bermula, dari aktivis Jaringan Peduli Perempuan dan Anak (JPPA) Jateng yang melaporkan dugaan KDRT dilakukan komisioner KIP SH terhadap istrinya.

Menurut juru bicara JPPA Jateng, Nihayatul Mukharomah tindakan KDRT yang dilakukan komisioner KIP Jateng, SH kepada istrinya H, berlangsung sejak 2010. Puncak KDRT terjadi pada Maret 2021, SH menampar pipi kanan istrinya berkali-kali, memukul kepala dengan botol air minum ukuran 800 mili liter, hingga botol tersebut terlempar.

Wakil Ketua KIP Jateng Zaenal Abidin Petir menambahkan, pihaknya telah mencoba memfasilitasi kedua belah pihak (SH dan istrinya) pada April 2016

lalu karena SH melakukan perselingkuhan. Bahkan KIP telah memanggil pernyataan untuk tidak menjadi pasangan selingkuh SH. "Pada tanggal 21 April 2016, difasilitasi oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, saudara SH bersama pasangan selingkuhannya telah menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi," jelas Zaenal.

Namun kemudian pada 27 Maret lalu dirinya menerima laporan kembali perihal kasus perselingkuhan yang dilakukan SH. Bahkan kali ini pasangan selingkuhnya adalah seorang staf di kantor KIP. Pada tanggal 27 Maret 2021, diketahui saudara SH diduga berselingkuh dengan FN yang merupakan pegawai dan asisten Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jateng. (Cha)

Salatiga WTP, DPRD Bentuk Pansus LHP BPK

SALATIGA (KR) - DPRD Salatiga membentuk panitia khusus (pansus) Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) tahun 2020 terhadap kegiatan Pemerintah Salatiga, Selasa (18/5). Dalam rekomendasi di BPK ditemukan 12 temuan yang cukup signifikan nilainya, meski saat ini Salatiga mendapat kategori wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan.

"Kami menggelar rapat paripurna internal DPRD dan membentuk pansus tindak lanjut LHP BPK agar nantinya bisa ditindaklanjuti temuan tersebut jangan sampai menjadi investigasi hukum. Harus diselesaikan 12 temuan BPK tersebut. Meskipun Salatiga WTP," tandas Ketua DPRD Salatiga, Dance Ishak Palit

kepada KR, Selasa (18/5).

Diungkapkan pansus tersebut bekerja selama satu bulan mulai hingga Juni 2021 dan akan menyampaikan hasil kerja mereka kepada lembaga DPRD melalui rapat paripurna kembali. Dari kajian di LHP BPK menurut Dance, ada 12 temuan dan yang paling banyak berada di RSUD Salatiga bahkan hampir setiap tahun ada temuan. Pansus akan bekerja ke instansi dan bekerja sama dengan inspektorat untuk menggali data secara mendalam sehingga mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, kata Dance. Pansus Tindak Lanjut LHP BPK DPRD Salatiga diketuai M Kemat (Fraksi PDI Perjuangan) dan Sekretaris M Fathoni (Fraksi) dan beberapa anggota dari fraksi lainnya. (Sus)

SELAMAT HARI JADI KE-280 KABUPATEN WONOGIRI

Kabupaten Wonogiri 280 MAJU MANDIRI SEJAHTERA GO-Nyawiji...

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

FRAKSI PDI PERJUANGAN

GIMANTO, SH. Ketua

SUPRIYANTO, ST. Sekretaris

KISYANTI, SE Bendahara

SELAMAT HARI JADI KABUPATEN Wonogiri 280 MAJU MANDIRI SEJAHTERA

SELAMAT HARI JADI KABUPATEN Wonogiri 280 MAJU MANDIRI SEJAHTERA

DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PDI-P KABUPATEN WONOGIRI

JOKO SUTOPO (Mas Jekek) Ketua

SETYO SUKARNO Sekretaris

SRIYONO, SPd. Bendahara

CV. SINERGY ARGANFA JAYA General Contractor & Materials Supplier

"ARI SANTOSO FAMILY"

PIMPINAN : ARI SANTOSO (ARI WAROK)

Jl. Cendana, Wates Kulon RT 01 RW 03, Bangsri, Purwantoro Telp. (0273)5316999

PENGURUS DAN ANGGOTA PIMPINAN CABANG GAPENSI KABUPATEN WONOGIRI

PANJI WIBOWO, ST. KETUA

PT. TUNGGAL DARA PUTRA Pimpin: H. Margono

Kantor Pusat : Jln Raya Ngadirojo-Wonogiri, KM 8 Wonogiri

Mimbar Legislatif

Jogo Tonggo Untuk Tangani Paham Radikal

SEKRETARIS Komisi A DPRD Jateng Ima Setyowati, mengatakan kunci utama dalam menanggulangi gerakan terorisme adalah peran sinergisitas antara pemerintah, masyarakat dan juga kepolisian. Keterlibatan tiga komponen tersebut sangat efektif untuk meredam gerakan yang mengarah kepada tindakan terorisme.



Ima Setyowati KR-Budiono

Ima Setyowati mengatakan hal ini saat menjadi nara sumber dalam Dialog Parlemen dengan mengangkat tema 'Taubat Teroris', pekan lalu. Dialog juga menghadirkan nara sumber lain seperti Direktur Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Jateng Kombes Pol Lafri Prasetyono, Syamsul Maifir dari Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT), dan eks napi terorisme (napi) Badawi Rahman. Dialog digelar di Cafe Cuprit, kompleks Taman Budaya Raden Saleh (TBRS) Semarang.

Awal keterlibatan paham radikalisme bermula dari kegiatan kelompok tertentu yang sering membahas doktrin-doktrin keagamaan, sampai pada akhirnya belajar cara perakit senjata api. Meski sekarang sudah tobat dan hidup di tengah masyarakat, namun masih saja mendapatkan stigma negatif. Peran ser-

ta masyarakat memang kunci utama. Pemprov Jateng juga turut andil dalam membuat program-program bertema wawasan kebangsaan. Harapannya program Jogo Tonggo nantinya juga bisa memberikan dukungan dalam kegiatan menangani paham radikal di tengah masyarakat.

Radikalisme yang berujung pada aksi teror adalah hal yang sangat mengkhawatirkan bila tidak tertangani sampai lingkup terkecil. Paham radikalisme saat ini sangat mudah mendapat simpatikan karena teknologi informasi hampir bisa diakses oleh semua kalangan.

Kombes Pol Lafri Prasetyono juga mengakui peran masyarakat dalam pengungkapan kasus terorisme sangat penting, terutama untuk meminimalisasi penyebaran radikalisme di tengah masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya paham tersebut seperti ekonomi dan tingkat pendidikan yang rendah. (*)

(Disampaikan oleh Sekretaris Komisi A DPRD Jateng Ima Setyowati kepada wartawan KR Biro Semarang, Budiono Isman)